



### SIMPOSIUM HAK ASASI MANUSIA GLOBAL

Pakar dan cendekiawan hak asasi manusia menghadiri simposium bertema “Pembangunan Bersama Belt & Road dan Kemajuan Tujuan Hak Asasi Manusia Global” di Jenewa, Swiss, pada 19 September 2023. Simposium yang berfokus pada kemajuan hak asasi manusia sebab di negara-negara peserta kerja sama Belt and Road Initiative (BRI) diadakan di sini Selasa.

## Tuntut Pertanggungjawaban, Korban Banjir Libya Bakar Rumah Wali Kota

Ratusan korban banjir di Libya melampirkan kemarahan mereka terhadap pihak berwenang dan menuntut pertanggungjawaban dengan membakar rumah Wali Kota Derna.

**LIBYA(IM)** - Rumah Wali Kota di kota Derna, Libya, dibakar ketika ratusan pengunjung rasa menuntut jawaban atas bencana banjir dahsyat yang terjadi pekan lalu.

Mereka berkumpul pada Senin (18/9) malam di Masjid Sahaba yang terkenal di kota itu, banyak yang meneriakkan agar pejabat tinggi di pemerintahan timur Libya dipecat.

Seluruh dewan kota Derna kini telah dibubarkan. Akses internet dan telepon juga telah ditutup dan jurnalis diperintahkan untuk meninggalkan tempat itu sebagai tindakan keras terhadap media.

Lebih dari 10.000 orang secara resmi hilang setelah dua bendungan tua dan bobrok jebol, sehingga banjir kota.

Angka yang diberikan mengenai jumlah orang yang diketahui meninggal sangat bervariasi. Namun Perseri-

katan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan pihaknya telah mengkonfirmasi hampir 4.000 kematian.

PBB sekarang mengatakan salah satu timnya telah ditolak izinnya untuk memasuki Derna.

“Kami dapat memastikan bahwa tim pencarian dan penyelamatan, tim medis darurat dan rekan-rekan PBB yang sudah berada di Derna terus beroperasi,” terang Najwa Mekki, dari badan kemanusiaan PBB OCHA, kepada kantor berita Reuters pada Selasa (19/9).

“Namun, tim PBB dijadwalkan melakukan perjalanan dari Benghazi ke Derna hari ini namun tidak diizinkan untuk melanjutkan perjalanan,” tambahnya.

Rumah Wali Kota Derna, Abdulmenam al-Ghathithi, telah menjadi pusat kemarahan masyarakat.

Warga mengatakan mereka tidak cukup diperingatkan oleh para pejabat, yang mereka yakini pasti sudah mengetahui akan terjadi curah hujan dalam jumlah besar.

Mereka mengatakan bahwa mereka juga diberi peringatan untuk tetap berada di rumah dibandingkan disuruh mengungsi, meskipun para pejabat menyangkal hal tersebut.

Sejak tergulingnya pemimpin lama Muammar Khadafi, Libya terpecah oleh perebutan kekuasaan dan saat ini memiliki dua pemerintahan, satu pemerintahan yang diakui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berbasis di Tripoli, dan satu lagi di timur negara itu yang didukung oleh panglima perang Jenderal Khalifa Haftar.

Ia menyebut banjir tersebut sebagai bencana alam namun banyak warga Libya yang tidak sepakat, dan mengatakan bahwa pemerintah Libya timur telah mengabaikan bendungan tersebut meskipun sudah ada peringatan sebelumnya mengenai kondisi bendungan tersebut yang rapuh.

Berbicara dari ranjang rumah sakitnya di Benghazi, Abdelqader al-Omrani, 48 tahun, mengatakan kepada

kantor berita AFP bahwa dia dan orang lain yang tinggal di dekat bendungan telah “mempingatkan pemerintah kota dan menuntut perbaikan” setelah melihat kebocoran pada dua tahun lalu.

Ilmuwan mencatat bahwa hingga 50% lebih banyak hujan mengguyur Libya timur karena pemanasan global yang disebabkan oleh aktivitas manusia.

Pada Selasa (19/9), sehari setelah protes, seorang menteri di pemerintahan Libya timur mengumumkan bahwa semua jurnalis telah diminta meninggalkan Derna, dan menuduh mereka menghambat pekerjaan tim penyelamat.

“Jangan ragu, ini bukan tentang kesehatan atau keselamatan, tapi tentang menghukum Dernawis [warga Derna] karena melakukan protes,” kata Emadeddin Badi dari lembaga pemikir Dewan Atlantik, dalam sebuah postingan di X (sebelumnya Twitter).

Selain upaya bantuan internasional yang besar, beberapa wilayah di Libya, yang hingga saat ini merupakan tempat dimana milisi saling berperang, kini mengirimkan sukarelawan dan kendaraan

pribadi mereka yang membawa makanan, air, obat-obatan, dan perlengkapan tidur.

Namun para aktivis kemanusiaan memperingatkan akan adanya krisis kesehatan masyarakat dan para demonstran mengatakan mereka membutuhkan lebih banyak bantuan.

Dan karena harta benda mereka yang paling penting tersapu air, mereka juga menginginkan fasilitas pemrosesan paspor dan dokumen identitas yang hilang.

Demonstrasi yang terjadi pada Senin (18/9) di Masjid Sahaba – yang sebagian rusak akibat banjir – adalah yang terbesar sejak banjir melanda, dan ada dugaan bahwa protes tersebut mendapat dukungan institusional.

“Lokasi protes, Masjid Sahaba, biasanya ditutup sebagai bagian dari area penyelamatan – jadi kenapa tiba-tiba semua masyarakat diizinkan pergi ke sana?” terang Claudia Gazzini dari International Crisis Group di Libya kepada BBC Newsday.

“Itu membatu berpikir bahwa itu bukanlah ledakan kemarahan yang spontan,” lanjutnya. ●tom

## Pertama Kali Dalam Sejarah PPI Jerman Dipimpin Wanita

**MUNICH (IM)**-Agnia Dewi Larasati terpilih sebagai perempuan pertama yang menjadi ketua umum PPI Jerman. Agnia terpilih melalui Sidang Perwakilan Anggota (SPA) yang diselenggarakan pada 16-17 September 2023 di Braunschweig.

Agnia adalah seorang mahasiswa S2 jurusan teknik elektro di Technical University of Munich. Dia telah lama dikenal dalam kepengurusan PPI Jerman karena komitmennya untuk meningkatkan hubungan pelajar Indonesia dan masyarakat internasional di Jerman.

Pada periode sebelumnya, Agnia menjabat sebagai wakil ketua umum PPI Jerman yang membawahi bidang pendidikan, hubungan internasional, dan hubungan masyarakat. Atas Pendidikan dan Kebudayaan Kedutaan Republik Indonesia di Jerman, Ardi Marwan mengatakan, PPI Jerman adalah organisasi Indonesia yang sangat penting dan mempunyai peran besar di Jerman. “PPI Jerman adalah organisasi Indonesia yang sangat penting di Jerman, perannya sangat besar dan bisa menjadi sumber informasi untuk pelajar Indonesia di Jerman yang berminat melanjutkan studinya di luar negeri,” ujar Ardi, dalam siaran pers.

Ardi mengapresiasi kepemimpinan PPI Jerman periode 2022-2023. Menurut Ardi, PPI Jerman telah menjalankan tugasnya dengan baik untuk menjembatani dan memwadahikan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Jerman dengan pelajar Indonesia di Jerman.

“Apresiasi untuk kepengurusan periode 2022-2023 untuk kinerjanya yang sangat baik, khususnya dalam berkomunikasi dengan para perwakilan pemerintah RI di Jerman,” kata Ardi. Agni berjanji untuk bekerja keras dalam memajukan organisasi PPI Jerman dengan fokus

untuk meningkatkan kualitas organisasi, memperkuat jaringan internasional dan forum kajian strategis untuk anggota, serta mengedepankan independensi menyongsong pemilihan umum Indonesia pada 2024. Agnia berharap dia bisa menjadi inspirasi bagi semua anggota, terutama perempuan untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan.

“Mimpi saya adalah agar lebih banyak lagi wanita yang berani untuk mengambil alih pucuk kekuasaan dalam suatu organisasi dan bisa menjadi inspirasi bagi semua anggota PPI Jerman untuk terus mengajuk PPI Jerman”, ujar Agnia.

Agnia juga mempresentasikan rencana garis besar PPI Jerman periode 2023-2024. Dia bertekad menjadikan PPI Jerman menjadi rumah inklusif kebanggaan pelajar Indonesia yang dapat mendorong daya saing untuk kemajuan bangsa dan negara. Agni membeberkan beberapa program unggulan seperti diskusi kajian strategis, dan PPIJ goes digital.

PPI Jerman dibentuk di Bad Godesberg, Jerman pada 4 Mei 1956 dan terdaftar sebagai badan hukum di kota Bonn pada tahun 1963. Organisasi kemahasiswaan ini telah menjadi pusat integrasi kultural masyarakat Indonesia di Jerman. PPI Jerman adalah organisasi yang bersifat politis non partais, ilmiah, sosial dan independen berbentuk perhimpunan.

Menurut data PPI Jerman, terdapat sekitar 9000 mahasiswa Indonesia (Ausbildung, Studienkolleg, S1, S2, S3) yang tinggal di berbagai kota di Jerman. Jerman memiliki jumlah mahasiswa Indonesia terbanyak di antara negara Eropa lainnya. Oleh sebab itu, terdapat 26 PPI Cabang yang mendukung PPI Jerman dalam menjalankan program kerja dan tugas sebagai penghimpun pelajar Indonesia di Jerman. ●gul

## Thaksin Bisa Bebas Bersyarat Akhir Februari Tahun Depan

**BANGKOK (IM)** - Wakil Direktur Jenderal Departemen Pemasaran Thailand Sitthi Sutivong mengatakan mantan perdana menteri Thailand Thaksin Shinawatra dapat dibebaskan bersyarat paling cepat pada akhir Februari. Pernyataan, Selasa (19/9) ini disampaikan setelah hukuman penjara Thaksin dikurangi dari delapan menjadi satu tahun penjara.

Politisi paling terkenal di Thailand itu akhirnya pulang setelah 15 tahun di pengasingan. Ia lari keluar negeri usai digulingkan kudeta militer pada tahun 2006. Selama berada di luar negeri, Thaksin dinyatakan bersalah in absentia dalam tiga kasus yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan, konflik kepentingan, dan penyempangan.

Kembalinya Thaksin ke Thailand bertepatan dengan kemunculan sekutunya, Srettha Thavisin, sebagai perdana menteri baru negara tersebut. Thavisin menjabat usai Thailand dilanda ketidakpastian

politik selama berbulan-bulan setelah partai pro-militer yang berkuasa kalah dalam pemilihan umum di bulan Mei.

Partai-partai yang bersekutu dengan Thaksin memenangkan setiap pemilihan umum sejak 2001 hingga jajak pendapat tahun ini ketika Pheu Thai, partai yang didukung oleh keluarganya, berada di posisi kedua. Thaksin, miliarder telekomunikasi populis menarik dukungan rakyat miskin Thailand yang sudah lama berselisih dengan para elit dan loyalis militer yang juga menggulingkan pemerintahan saudara perempuannya pada tahun 2014.

Ada spekulasi Thaksin telah mencapai kesepakatan dengan musuh-musuh lamanya. Setelah partai-partai pro-militer memberikan dukungan kepada kandidat Pheu Thai, Srettha, untuk membentuk pemerintahan baru.

Thaksin dan Srettha menyangkal hal ini. Pada malam pertamanya di Thai-

land, Thaksin dipindahkan ke rumah sakit polisi karena mengalami nyeri dada dan tekanan darah tinggi dan saat ini masih dalam perawatan.

Beberapa hari kemudian, Raja Maha Vajiralongkorn meringankan hukuman delapan tahun penjara menjadi satu tahun. Namun ia dapat dibebaskan lebih cepat. “Setelah menjalani enam bulan masa hukumannya, Thaksin akan memenuhi syarat untuk mendapatkan pembebasan bersyarat bagi narapidana yang berusia di atas 70 tahun atau mereka yang sakit,” kata Sitthi.

Sitthi mengatakan Departemen Pemasaran membuat penilaian untuk setiap kasus dan tidak ada proses permohonan pembebasan bersyarat dalam kasus-kasus ini. Ia mengatakan perawatan mantan perdana menteri di rumah sakit adalah keputusan dokter dan tidak memiliki batas waktu. ●tom



### KAPAL RUMAH SAKIT ANGKATAN LAUT TIONGGOK

Kapal rumah sakit angkatan laut Tiongkok “Peace Ark” tiba di sebuah pelabuhan di Zhoushan, Provinsi Zhejiang, Tiongkok Selasa (19/9). Kapal rumah sakit angkatan laut Tiongkok “Peace Ark” tiba di sebuah pelabuhan di Zhoushan pada Selasa pagi setelah menyelesaikan kunjungan persahabatan dan layanan medis kemanusiaan ke Kiribati, Tonga, Vanuatu, Kepulauan Solomon, dan Timor Timur.

## Kasus Pembunuhan Buat Kanada dan India Bersitegang

**OTTAWA(IM)** - Kanada mengusir seorang diplomat India di tengah penyelidikan kasus pembunuhan seorang aktivis Sikh di Kanada. Diplomat itu diduga mempunyai keterkaitan dengan kasus pembunuhan tersebut.

Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau pada Senin (18/9) mengatakan kepada parlemen bahwa badan intelijen Kanada telah menyelidiki tuduhan tersebut setelah pemimpin Sikh Hardeep Singh Nijjar, tewas ditembak pada 18 Juni di luar pusat kebudayaan Sikh di Surrey, British Columbia. Nijjar adalah seorang pendukung kuat tanah air Sikh yang merdeka.

Nijjar sedang mengorganisasi referendum tidak resmi di India untuk negara Sikh yang merdeka pada saat kematiannya. Tahun lalu, pihak berwenang India mengumumkan hadiah uang tunai bagi informasi yang mengarah pada penangkapan Nijjar. Pemerintah India menuduh Nijjar terlibat dalam dugaan penyerangan terhadap seorang pendeta Hindu di India. Namun gerakan ini masih mendapat dukungan di India utara, serta beberapa negara seperti Kanada dan Inggris yang merupakan rumah bagi diaspora Sikh dalam jumlah besar.

Trudeau mengatakan kepada Parlemen, dia membahas kasus pembunuhan tersebut dengan Perdana Menteri India Narendra Modi di sela-sela KTT G20. Trudeau mengatakan kepada Modi bahwa keterlibatan pemerintah India tidak dapat diterima dan dia meminta kerja sama dalam penyelidikan. “Keterlibatan pemerintah asing dalam pembunuhan warga negara Kanada di tanah Kanada merupakan pelanggaran kedaulatan kami yang tidak dapat diterima. Dengan sekuat tenaga saya terus mendesak pemerintah India untuk bekerja sama dengan Kanada untuk menyelesaikan masalah ini,” ujar Trudeau.

Pada Selasa (19/9), Kementerian Luar Negeri India mengeluarkan pernyataan yang menolak tuduhan Pemerintahan Kanada atas pembunuhan Nijjar. India menyebut tuduhan itu tidak masuk akal. Kementerian Luar Negeri menambahkan, Trudeau melontarkan tuduhan serupa kepada Modi pada KTT G20 baru-baru ini. “Tuduhan yang tidak berdasar tersebut

berupaya mengalihkan fokus dari teroris dan ekstremis Khalistani, yang telah diberi perlindungan di Kanada dan terus mengancam kedaulatan dan integritas wilayah India,” kata pernyataan Kementerian Luar Negeri India, merujuk pada usulan nama tanah air Sikh.

Menteri Luar Negeri Kanada, Melanie Joly mengatakan, seorang diplomat tinggi, yang merupakan kepala intelijen India di Kanada, telah diusir. Pengusiran ini sebagai konsekuensi atas dugaan keterlibatan dalam kasus pembunuhan terhadap Nijjar.

Pengusiran itu terjadi ketika hubungan antara Kanada dan India sedang tegang. Pembicaraan dagang telah gagal dan Kanada baru saja membatalkan misi dagang ke India yang direncanakan pada musim gugur ini.

Pada pertemuan G20, Modi menyatakan keprihatinan yang kuat atas penanganan Kanada terhadap gerakan kemerdekaan Punjab di kalangan Sikh di luar negeri. Pernyataan tersebut menggambarkan gerakan Sikh mendorong pemisahan diri dan menghasut kekerasan terhadap diplomat India. Mereka meminta Kanada untuk bekerja sama dengan India dalam mengatasi ancaman terhadap diaspora India di Kanada.

Kanada memiliki populasi Sikh lebih dari 770.000, atau sekitar 2 persen dari total penduduknya. Menteri Keamanan Publik Kanada, Dominic LeBlanc mengatakan, penasihat keamanan nasional Kanada dan kepala dinas mata-mata Kanada telah melakukan perjalanan ke India untuk bertemu dengan rekan-rekan mereka. Langkah ini sebagai penyelidikan pembunuhan aktif yang dipimpin oleh Royal Canadian Mounted Police.

Joly mengatakan, Trudeau juga membicarakan masalah ini dengan Presiden AS Joe Biden dan Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak. Joly juga mengatakan, dia akan mengangkat masalah ini dengan rekan-rekannya di pertemuan G7 pada Senin (17/9) malam di New York City menjelang Majelis Umum PBB. “Kami sangat prihatin dengan tuduhan yang diumumkan Perdana Menteri Trudeau. Kami tetap melakukan kontak rutin dengan mitra Kanada kami. Investigasi di Kanada harus dilanjutkan dan pelakunya diadili,” juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih Adrienne Watson. ●ans

## Putra Presiden AS Mengaku Tak Bersalah Atas Tuduhan Kepemilikan Senjata Api

**NEW YORK(IM)** - Putra Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden, Hunter, akan mengaku tidak bersalah atas tiga tuntutan pidana terkait pembelian senjata yang ia lakukan pada 2018.

Dalam suratnya kepada hakim, pengacara Abbe Lowell membenarkan permohonan tersebut sambil meminta agar sidang awal di pengadilan diadakan dari jarak jauh. Biden pekan lalu didakwa memiliki senjata ketika dia menjadi pengguna narkoba ilegal dan berbohong untuk membelinya.

Jika terbukti bersalah, dia bisa menghadapi hukuman hingga 25 tahun penjara. Hunter (53), akan mengesampingkan pembelaan dakwaan, yang hanya terdiri dari beberapa halaman dan dapat dengan mudah dibaca melalui konferensi video,” tulis Lowell dalam dokumen dua halaman di pengadilan pada Selasa (19/9), dikutip BBC.

Pengacara tersebut menambahkan bahwa meminta pemeriksaan melalui video bukanlah berarti putra presiden “mencari perlakuan khusus”. Sebaliknya, hal ini akan “meminimalkan beban yang tidak perlu pada sumber daya pemerintah dan gangguan terhadap gedung pengadilan dan wilayah pusat kota” dari petugas Dinas Rahasia yang mendampingi Biden.

Tim hukum Biden awalnya meminta klien mereka untuk hadir secara jarak jauh pada minggu lalu. Jaksa menentang permintaan tersebut. Hakim Christopher Burke, dalam perintah pengadilan pada Senin (18/9) malam, meminta agar permintaan tersebut dibuat secara tertulis pada Selasa (19/9), dan tanggapan dari jaksa akan diberikan pada Rabu (20/9).

Tuduhan terhadap Biden berasal dari Oktober 2018, ketika dia berjuang melawan kecanduan kokain setelah saudaranya, Beau, meninggal karena kanker otak. Dia dikatakan membeli pistol Colt Cobra secara tiba-tiba pada bulan Oktober 2018, kira-kira dua bulan setelah menyelesaikan tugas rehabilitasi lainnya.

Namun Biden diduga berbohong pada formulir permohonan senjata api federal bahwa dia tidak menggunakan obat-obatan terlarang pada saat itu, sehingga dia kini menghadapi dua dakwaan kejahatan yang masing-masing dapat dihukum hingga 10 tahun.

Tuduhan ketiga berkaitan dengan kepemilikan senjata api saat menjadi pengguna narkoba dan ancaman hukuman penjara maksimal lima tahun.

Senjata tersebut ditemukan di dalam kendaraan Biden oleh mendiang janda saudaranya, yang membuangnya ke tempat sampah di belakang toko kelontong karena takut Biden akan menggunakannya untuk melukai dirinya sendiri.

Polisi Delaware dan agen Dinas Rahasia akan melanjutkan penyelidikan, dan senjata yang hilang dikembalikan ke toko senjata beberapa hari kemudian oleh seorang pria yang mencari barang-barang daur ulang di tempat sampah. Pada Juni lalu, kesepakatan pembelaan yang dicapai antara jaksa dan tim hukum Biden mengenai tuduhan senjata dan pajak gagal setelah hakim lain mengajukan keberatan, dengan menyatakan bahwa perjanjian tersebut “tidak biasa”.

Berdasarkan ketentuan perjanjian itu, Biden akan dipaksa untuk mengakui kepemilikan senjata api ilegal dan menyetujui perawatan dan pemantauan narkoba untuk menghindari tuduhan kejahatan dan kemungkinan hukuman penjara. Dia juga akan mengaku bersalah atas dua tuduhan pelanggaran karena gagal membayar pajak tepat waktu pada 2017 dan 2018.

Namun, para analis hukum mengatakan bahwa dasar tuduhan senjata terhadap Biden kemungkinan besar akan mendapat tantangan konstitusional. Biden adalah pelaku pertama kali yang memiliki senjata tersebut kurang dari dua minggu dan tidak pernah menggunakannya. Hanya sedikit orang yang cocok dengan profil tersebut yang menghadapi tuduhan seperti itu, apalagi hukuman penjara.

Tim hukum yang membela Biden berpendapat bahwa tuduhan tersebut bernuansa politik. Pada Senin (18/9), pengacara pembela menggugat Internal Revenue Service dengan tuduhan pengungkapan informasi pajak Biden yang melanggar hukum.

Gugatan tersebut merupakan penolakan terhadap dua ang pajak yang memberikan kesan di depan Kongres AS awal tahun ini bahwa Biden telah menerima perlakuan istimewa dalam penyelidikan atas dugaan pelanggaran perajakannya.

Meskipun tidak memegang posisi dalam pemerintahan, Biden yang lebih muda telah menjadi tokoh politik bagi Gedung Putih. ●gul